

Pengaruh Tingkat Demokrasi (Tipe Rezim) Suatu Negara terhadap Anggaran Pertahanan

Endro Tri Susdarwono^{1*}, Alma Wiranta²

¹Wangsa Syailendra Institute, Indonesia. Email: susdarwonoendrottri@gmail.com

²Universitas Pertahanan, Indonesia. Email: almawiranta.aw@gmail.com

Diterima: 19/11/2023

Direvisi: 24/12/2023

Disetujui: 30/12/2023

Abstrak

Indeks demokrasi mengkategorikan setiap negara ke dalam salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait pengaruh tingkat demokrasi (tipe rezim) suatu negara terhadap anggaran pertahanan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab terkait apakah semakin tinggi atau rendahnya tingkat demokrasi suatu negara mempengaruhi besar atau kecilnya anggaran pertahanan suatu negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan menggunakan Indeks Demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dan alokasi pertahanan negara yang dikeluarkan oleh SIPRI. Analisis data menggunakan metode pengujian hipotesis korelasi Cramer C. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP adalah 0,3869. Nilai korelasi sebesar itu tergolong sedang. Tetapi, kemungkinan adanya korelasi antara kedua hal itu telah bisa dipastikan. Rekomendasi yang diberikan bahwa dalam menentukan besaran anggaran pertahanan hendaknya disesuaikan dengan praktik yang sudah dijalankan di negara-negara demokrasi dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait semisal ancaman dari luar.

Kata Kunci

Anggaran pertahanan; Gross Domestic Product (GDP); indeks demokrasi; tipe rezim

Abstrack

The democracy index categorizes each country into one of four regime types: full democracy, flawed democracy, hybrid regime, and authoritarian regime. This research aims to provide a description of the influence of a country's level of democracy (regime type) on the defense budget. The research question to be answered is whether the higher or lower level of democracy in a country affects the size or size of a country's defense budget. The approach used in this research is quantitative descriptive. The data used uses the Democracy Index compiled by the Economist Intelligence Unit (EIU) and national defense allocations issued by SIPRI. Data analysis uses the Cramer C correlation hypothesis testing method. This research concludes that there is a correlation between a country's regime type and the size of the defense budget according to the percentage of GDP received. The level of close relationship that occurs between a country's regime type and the size of the defense budget as a percentage of GDP is 0.3869. This correlation value is classified as moderate. However, the possibility of a correlation between the two things has been confirmed. The recommendation given is that in determining the amount of the defense budget it should be adjusted to the practices that have been implemented in democratic countries by taking into account several related variables such as external threats.

Keywords

Defense budget; Gross Domestic Product (GDP); democracy index; regime type

Cara Pengutipan

Susdarwono, E.T., & Wiranta, Alma. (2024). Pengaruh Tingkat Demokrasi (Tipe Rezim) Suatu Negara terhadap Anggaran Pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1(1). 20-35. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22772>



PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi pilihan menuju masa depan bangsa dan negara yang adil dan Makmur dimana seluruh komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi (Rangkuti, 2019). Bahwa kita pernah berjuang dan kita gagal di masa lalu dimana demokrasi mengalami fase pasang naik dan pasang surut, pengalaman itu mesti dipandang sebagai pelajaran yang terus menerus direfleksikan (Indrajat, 2010; Yunitasari et al., 2017). Salah satu pokok penting pembaharuan pemerintahan mestinya bukanlah sekedar mendahulukan kebebasan, yang tampaknya menjadi hegemoni era reformasi sekarang ini (Lawelai et al., 2022). Yang pertama dan terutama justru bagaimana memenuhi kebutuhan paling pokok seluruh rakyat, yakni kesejahteraan secara materiil maupun spiritual (Rangkuti, 2019).

Terkait dengan pemaknaan nilai demokrasi dalam sebuah masyarakat tertentu, negara-negara barat memang sangat gencar untuk memperluas nilai-nilai demokrasi yang secara absolut mereka yakini kebenarannya (Badu, 2015). Dalam demokrasi ala barat terkandung nilai-nilai kebebasan atau "*freedom*" dan kesetaraan atau "*equality*" yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dan mengekspresikan aspirasi politik mereka, termasuk memperjuangkan segala sesuatu yang mengakomodasi kepentingan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hakiki, 2015; Mubarok, 2018). Dalam perjalanan sejarah, kita menyaksikan berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia barat untuk mengglobalkan demokrasi dengan sejumlah slogan seperti "*democracy is the best form of government*", atau "*democracies do not fight one another*" (Imron et al., 2021). Dan dapat diamati pula bahwa seringkali dalam upaya mengglobalkan demokrasi, mereka melupakan bahwa tidak semua masyarakat atau bangsa dapat menerima nilai-nilai demokrasi ala barat tersebut secara mentah-mentah (Sukma & Saparuli, 2021; Yudhoyono, 2013).

Dalam wacana ilmuwan politik, demokrasi memiliki sejumlah pengertian maupun syarat-syarat yang dapat diidentifikasi sebagai ciri-ciri yang utama. Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik (Sanit, 2015; Rianto, 2019). Yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) control terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan

kekuasaan itu pada orang lain atau Lembaga yang mewakili masyarakat, (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum (Dedi, 2021). Dalam definisinya tampak bahwa Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi (Brogi & Parcu, 2014).

Sistem pemerintahan demokrasi menuntut adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara, atau pengambilan keputusan (Tjarsono, 2013). Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan itu pada masa Yunani kuno dilakukan secara langsung. Karena wilayah negara (yang hanya merupakan *city state*) dan jumlah penduduk yang relative kecil memungkinkan hal itu, sehingga dikenallah apa yang disebut "demokrasi langsung" (*direct democracy*) (Nugroho, 2012).

Tetapi dalam konsep negara moderen yang merupakan *national state* di mana luas wilayah dan rakyatnya sangat besar. Demokrasi langsung tak mungkin bisa diterapkan lagi. Lalu diciptakan suatu Lembaga baru atau dewan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat sendiri lewat suatu pemilihan umum (Roring, 2020). Sehingga dikenallah apa yang disebut demokrasi tak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*), dan lahirlah *representative government*.

Dengan demikian, suatu sistem pemerintahan demokrasi dengan perwakilan (*representative government*) mengandung suatu konsekuensi keharusan adanya suatu pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih/menentukan perwakilan rakyat (Wahyudi et al., 2022). Ini adalah juga sesuai dengan definisi *representative government* yang pernah dikemukakan oleh *international commission of jurist* dalam konferensi di Bangkok tahun 1965, "*representative government deriving its power and authority from the people, which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them.*"

Pendefinisian demokrasi yang sejalan dengan Dahl datang dari April Carter, William Sebastian dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat dan tepat sebagai membatasi kekuasaan. Sementara Ebenstein dan Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan, yang kemudian dirinci oleh mereka ke dalam kriteria-kriteria konseptual berikut: (1) empirisme rasional; (2) pementingan individu; (3) teori instrumental tentang negara; (4) prinsip kesukarelaan; (5) hukum dibalik hukum; (6) penekanan pada soal cara; (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia; dan (8) persamaan asasi semua manusia. Kesemua kriteria itu diletakkan oleh Ebenstein dan Fogelman dalam

konteks penghargaan kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya (Muntoha, 2009; Asrun, 2016).

Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John Herz dan Henry B. Mayo, Carter dan Herz mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dengan dijalankan prinsip-prinsip berikut” (1) adanya pembatasan atas segala tindakan pemerintah dengan tujuan menjamin perlindungan atas individu maupun kelompok. Pembatasan yang dimaksud dilaksanakan dengan tata aturan pergantian secara berkala terhadap pimpinan melalui perwakilan rakyat; (2) perwujudan toleransi atas pendapat yang berposisi atau berlawanan; (3) jaminan terhadap equality before the law dengan tanpa adanya perbedaan terhadap kedudukan politik; (4) jaminan terselenggaranya pemilihan yang bebas dengan model perwakilan efektif; (5) jaminan terhadap kebebasan untuk partisipasi ataupun oposisi untuk partai politik, perorangan dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan ataupun yang sejenisnya; (6) penghormatan atas hak rakyat dalam memberikan pandangan meskipun tidak populer; (7) adanya tempat untuk hak-hak minoritas (Nabus & Siahaan, 2021).

Sedangkan, Hendry B. Mayo memberikan deskripsi terhadap nilai-nilai diatas sebagai suatu kriteria ketika hendak mendefinisikan demokrasi, (1) penyelesaian pertikaian dengan damai; (2) pemahaman terhadap perubahan yang terus terjadi dimasyarakat dengan jalan damai; (3) estafet penguasa secara teratur; (4) minimalisasi penggunaan paksaan; (5) adanya penghormatan serta pengakuan atas keanekaragaman; (6) penegakkan keadilan; (7) mengembangkan ilmu pengetahuan; (8) penghormatan serta pengakuan atas kebebasan (Koho, 2021; Kristal, 2021). Nilai-nilai ini hampir selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Amien Rasi meliputi sepuluh kriteria, yakni: (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) persamaan di depan hukum; (3) distribusi pendapatan secara adil; (4) kesempatan pendidikan yang sama; (5) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (7) mengindahkan tata krama politik; (8) kebebasan individu; (9) semangat kerjasama; dan (10) hak untuk protes (Iqlima, 2016; Indiyastutik, 2016).

Dari penelusuran terhadap pendefinisian demokrasi beserta sejumlah ciri-ciri yang diungkapkan oleh sejumlah ilmuwan politik seperti dipaparkan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan mengenai demokrasi secara umum. Bahwa demokrasi pada esensi mengutamakan kebebasan dan perlindungan akan hak-hak asasi warga negara. Hukum diletakkan sebagai pengatur dalam menjalankan aturan main demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Peningkaran terhadap sejumlah ciri-ciri yang telah disebutkan diatas, sama halnya dengan membangun demokrasi tanpa

basiss filosofis yang kuat, mengakibatkan demokrasi yang berjalan adalah demokrasi seolah-olah atau demokrasi papan nama belaka, seperti yang lazim terjadi di negara-negara otoriter. Mengaku menjalankan sistem politik demokratis, tetapi dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan kehendak demokrasi itu sendiri.

Penelitian Collier dan Hoeffler (2002a, 2002b) menemukan bahwa ancaman eksternal dan internal mempengaruhi volume pengeluaran militer. Faktor lain yang dikemukakan oleh mereka adalah meningkatnya kekuatan politik militer di rezim non-demokratis, dan ketersediaan sumber daya keuangan bagi pemerintah. Penelitian lain oleh Yildirim & Sezgin (2005) dengan judul *Democracy and Military Expenditure: A Cross-Country Evidence* yang menguji secara empiris hubungan antara pengeluaran militer dan demokrasi yang diselidiki dengan menggunakan teknik estimasi cross section dan panel menyimpulkan bahwa tingkat demokrasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat pengeluaran militer yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Hauenstein, Smith, dan Souva (2021) menganalisis dampak peningkatan tingkat demokrasi terhadap perdamaian, dengan alasan bahwa semakin tinggi tingkat demokrasi, kemungkinan konflik antar negara menurun. Dari argumen ini dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang lebih demokratis mengalokasikan lebih sedikit sumber daya mereka yang langka untuk tujuan pertahanan dibandingkan negara-negara yang kurang demokratis. Sedangkan penelitian Brauner (2012) yang mengaplikasikan model efek tetap dua arah dan panel VAR untuk menguji hubungan dan pola kausalitas Granger antara ukuran tipe rezim, PDB, dan pengeluaran militer menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti dimana rezim otoriter cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk militer dibandingkan negara demokrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait pengaruh tingkat demokrasi (tipe rezim) suatu negara terhadap anggaran pertahanan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab terkait apakah semakin tinggi atau rendahnya tingkat demokrasi suatu negara mempengaruhi besar atau kecilnya anggaran pertahanan suatu negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan menggunakan Indeks Demokrasi yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan alokasi pertahanan negara yang dikeluarkan oleh SIPRI. Analisis data menggunakan metode pengujian hipotesis korelasi Cramer C. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel

dengan variabel yang lain dimana keduanya menyertakan beberapa kategori atau karakteristik yang melekat pada masing-masing variabel. Melalui metode ini, variabel bebas dan variabel terikat yang terdiri dari beberapa kategori ditampilkan dalam suatu tabel. sesudah itu, serangkaian prosedur pengujian serta perhitungan harus dilakukan guna menentukan status penerimaan atau penolakan hipotesis nihil.

Tabel kontinjensi yang digunakan sebagai alat bantu digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk Umum Tabel Kontinjensi untuk Analisis Korelasi Cramer C

Variabel	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y _c	Jumlah
X ₁	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a _{1c}	R ₁
X ₂	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a _{2c}	R ₂
X ₃	a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a _{3c}	R ₃
X _r	a _{r1}	a _{r2}	a _{r3}	a _{rc}	R _r
Jumlah	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z _c	n

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejatuhan rezim-rezim dictator di negara bagian wilayah Amerika Latin seperti Brazil, Chile, Argentina dan bubarnya negara-negara komunis Pakta Warsawa, seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Cekoslovakia, dan bahkan Uni Soviet sendiri, menunjukkan bahwa ideologi yang menampilkan bentuk-bentuk otoriter dan totaliter, sudah tidak mendapatkan tempat di hati rakyat lagi. Pemerintah Demokratik yang memberikan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lebih banyak dipilih (Diki & Nurmalasari, 2021). Karena dalam sistem politik yang demokratik, hak-hak dasar manusia dalam bidang politik seperti hak untuk berpendapat secara bebas, berkumpul dan berserikat dapat dilaksanakan tanpa ada pembatasan dari pemerintah.

Di suatu negara yang menganut sistem politik totaliter ataupun otoriter, terdapat pembatasan yang sedemikian rupa sehingga ekspresi atau penghormatan terhadap hak-hak dasar seperti hak dalam bidang politik sangat minim ataupun bisa dikatakan hampir tidak ada. Segala kegiatan yang dilakukan oleh rakyat dapat terselenggara melalui izin secara sangat ketat. Pengekangan terhadap ekspresi ataupun kebebasan yang diterapkan oleh negara dengan sistem otoriter membuat rakyat sangat tertekan. Terjadi indoktrinasi ataupun pengontrolan pikiran rakyat menurut kehendak penguasa. Yang sangat mencolok dapat dibandingkan dengan negara dengan sistem demokrasi terlihat dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk sensor ketat bahkan tidak jarang pembredelan pers juga dilakukan (Sofyan, 2013).

Akan tetapi meskipun secara nyata bahwa terdapat pembatasan terhadap hak-hak politik rakyat yang sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai dalam demokrasi, negara dengan tipe rezim otoriter selalu bersikukuh bahwa mereka telah mengimplementasikan suatu sistem pemerintahan yang sudah dilandaskan pada demokrasi. Di negara-negara komunis Pakta Warsawa, diintrodusir istilah “demokrasi rakyat” untuk menarik legitimasi, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari kalangan internasional. Landasan operasional untuk dikatakan sebagai negara dengan tipe demokrasi sangat jelas, dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum kriteria demokrasi (Admojo et al., 2021). Terdapat kriteria umum ataupun prinsip-prinsip daripada negara demokratis yang selama ini digunakan sebagai parameter dalam penentuan kadar demokrasi yang diterapkan oleh suatu negara (Harimurti, 2022).

Indeks Demokrasi adalah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), divisi penelitian dari Economist Group, sebuah perusahaan swasta yang berbasis di Inggris yang menerbitkan surat kabar mingguan *The Economist*. Mirip dengan Indeks Pembangunan Manusia tetapi secara terpusat berkaitan dengan lembaga-lembaga politik dan kebebasan, indeks mencoba untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara dan wilayah, di mana 166 adalah negara berdaulat dan 164 adalah negara anggota PBB.

Indeks tersebut didasarkan pada 60 indikator yang dikelompokkan dalam lima kategori berbeda, mengukur pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik. Selain skor numerik dan peringkat, indeks mengkategorikan setiap negara ke dalam salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. *The Economist* telah menerbitkan laporan dengan versi terbaru dari Indeks Demokrasi untuk tahun 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. (Studi indeks Demokrasi awalnya dilaporkan setiap dua tahun, laporan pertama diterbitkan pada 2006, kemudian pada 2008 dan 2010. Sejak 2010 indeks menjadi tahunan.)

Indeks Demokrasi menghasilkan rata-rata tertimbang berdasarkan jawaban atas 60 pertanyaan, masing-masing dengan dua atau tiga jawaban yang diizinkan. Sebagian besar jawaban merupakan penilaian para ahli. Beberapa jawaban disediakan oleh survei opini publik dari masing-masing negara. Dalam kasus negara-negara yang hasil surveinya tidak ada, hasil survei untuk negara-negara serupa dan penilaian ahli digunakan untuk mengisi kesenjangan.

Pertanyaan dikelompokkan menjadi lima kategori:

- a. proses pemilu dan pluralisme
- b. kebebasan sipil

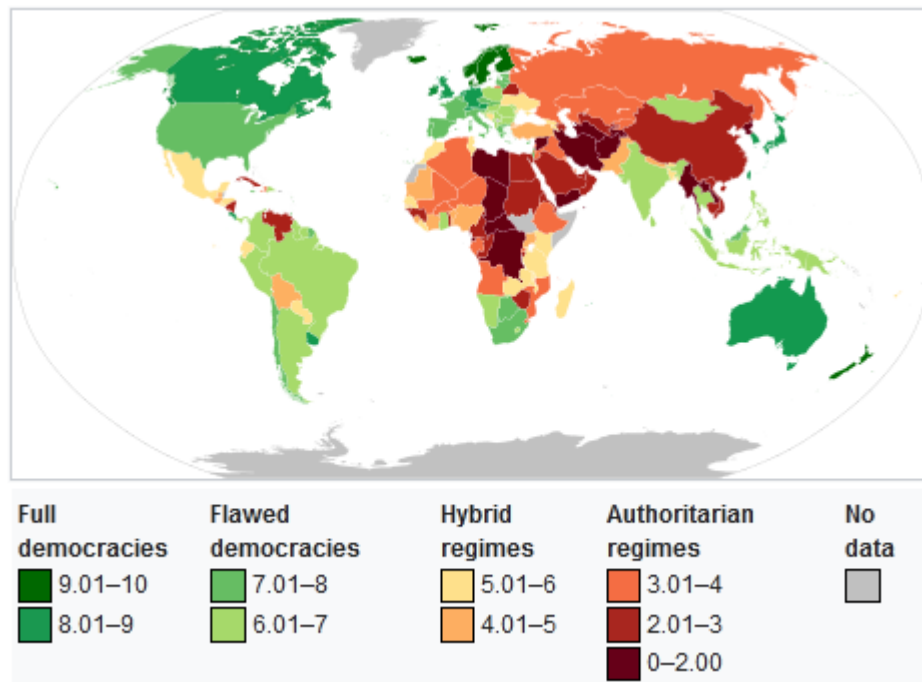
- c. fungsi pemerintahan
- d. partisipasi politik
- e. budaya politik

Setiap jawaban diubah menjadi skor, baik 0 atau 1, atau untuk pertanyaan tiga jawaban, 0, 0,5 atau 1. Dengan pengecualian yang disebutkan di bawah, dalam setiap kategori, skor ditambahkan, dikalikan sepuluh, dan dibagi dengan jumlah pertanyaan dalam kategori. Ada beberapa dependensi modifikasi, yang dijelaskan lebih tepat daripada prosedur aturan utama. Dalam beberapa kasus, jawaban yang menghasilkan nol untuk satu pertanyaan membatalkan pertanyaan lain; misalnya jika pemilihan legislatif nasional dan kepala pemerintahan tidak dianggap bebas (pertanyaan 1), maka pertanyaan berikutnya, "Apakah pemilihan... adil?", tidak dianggap, tetapi otomatis mendapat skor nol. Demikian pula, ada beberapa pertanyaan yang dianggap sangat penting sehingga skor rendah pada mereka menghasilkan penalti pada jumlah skor total untuk masing-masing kategori, yaitu:

- a. "Apakah pemilihan nasional bebas dan adil";
- b. "Keamanan memilih";
- c. "Pengaruh kekuatan asing terhadap pemerintah";
- d. "Kemampuan PNS dalam melaksanakan kebijakan".

Lima indeks kategori, yang tercantum dalam laporan, kemudian dirata-ratakan untuk menemukan skor keseluruhan untuk negara tertentu. Akhirnya, skor, dibulatkan menjadi dua desimal, menentukan klasifikasi tipe rezim negara tersebut.

Laporan tersebut membahas indeks demokrasi lainnya, seperti yang didefinisikan, mis. oleh Freedom House, dan memperdebatkan beberapa pilihan yang dibuat oleh tim dari Economist Intelligence Unit. Dalam perbandingan ini, penekanan yang lebih tinggi ditempatkan pada opini dan sikap publik, yang diukur dengan survei, tetapi di sisi lain, standar hidup ekonomi tidak ditimbang sebagai salah satu kriteria demokrasi (seperti yang tampaknya dilakukan oleh beberapa peneliti lain).



Gambar 1. The 2021 Economist Intelligence Unit Democracy Index map

Demokrasi penuh adalah negara-negara di mana kebebasan sipil dan kebebasan politik fundamental tidak hanya dihormati tetapi juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif untuk berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Negara-negara ini memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan pemerintah yang valid, peradilan independen yang keputusannya ditegakkan, pemerintah yang berfungsi secara memadai, dan media yang beragam dan independen. Negara-negara ini hanya memiliki masalah terbatas dalam fungsi demokrasi.

Demokrasi yang cacat adalah negara-negara di mana pemilihannya adil dan bebas dan kebebasan sipil dasar dihormati tetapi mungkin memiliki masalah (misalnya pelanggaran kebebasan media dan penindasan kecil terhadap oposisi dan kritikus politik). Negara-negara ini memiliki kesalahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang kurang berkembang, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan masalah dalam fungsi pemerintahan.

Rezim hibrida adalah negara dengan kecurangan pemilu reguler, mencegah mereka dari demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini umumnya memiliki pemerintah yang menerapkan tekanan pada oposisi politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, pelecehan dan tekanan yang ditempatkan pada media, supremasi hukum yang lemah, dan kesalahan yang lebih nyata daripada demokrasi yang cacat di bidang budaya politik yang terbelakang, tingkat rendah partisipasi dalam politik, dan isu-isu dalam fungsi pemerintahan.

Rezim otoriter adalah negara di mana pluralisme politik tidak ada atau sangat terbatas. Negara-negara ini sering kali merupakan monarki absolut atau kediktatoran, mungkin memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional tetapi dengan signifikansi yang sedikit, pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil adalah hal biasa, pemilihan umum (jika terjadi) tidak adil atau bebas (termasuk pemilihan palsu), media sering dimiliki negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa, peradilan tidak independen, dan penyensoran serta penekanan kritik pemerintah adalah hal biasa.

Tabel 2. Persentase Anggaran Pertahanan terhadap GDP Menurut Jenis Rezim

Jenis Rezim	% Anggaran Pertahanan Terhadap GDP			Jumlah
	<1	1 - 2	2>	
Full democracy	5	11	1	17
Flawed democracy	7	24	10	41
Hybrid regime	10	10	9	29
Authoritarian	2	12	15	29
Jumlah	24	57	35	116

Dari data yang telah diperoleh, dikaji kemungkinan adanya hubungan antara jenis rezim dengan anggaran pertahanan. Berkenaan dengan pengkajian ini, perlu dilaksanakan serangkaian prosedur pengujian yang meliputi:

Berdasarkan konteks keadaan dalam penelitian ini, hipotesis nihil yang dirumuskan menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP. Apabila dirumuskan secara ringkas, kedua hipotesis dalam penelitian kasus ini adalah sebagai berikut:

- H₀ : Tidak ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP
- H₁ : Ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP

Taraf signifikansi pada penelitian ini ditentukan sebesar 5%. Selanjutnya dipadankan dengan derajat kebebasan baris yang dikalikan dengan derajat kebebasan kolom. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam tabel, derajat kebebasan baris adalah 3 (4-1) dan derajat kebebasan kolom adalah 2 (3-1). Sehingga derajat kebebasan secara keseluruhan adalah 6. Dalam tabel, nilai khai-kuadrat bagi taraf signifikansi 5% dan

derajat kebebasan 6 adalah 12,592. Nilai khai-kuadrat sebesar 12,592 ini merupakan landasan perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir.

Karena nilai khai-kuadrat dalam tabel telah diketahui, kriteria pengujian bisa dirumuskan. Atas dasar nilai khai-kuadrat dalam tabel, kriteria pengujian yang berlaku adalah bahwa hipotesis nihil diterima jika

$$X^2 \leq 12,592$$

Dan hipotesis nihil dinyatakan tertolak jika

$$X^2 > 12,592$$

Prosedur yang dilakukan setelah sampai tahapan ini, sebelum perhitungan nilai khai-kuadrat dilakukan, frekuensi yang diharapkan dalam setiap sel harus diketahui besarnya. Berdasarkan formula, frekuensi yang diharapkan dari setiap sel ditunjukkan dalam tabel

$e_{11} = \frac{(17 \times 24)}{116} = 3,52$	$e_{12} = \frac{(17 \times 57)}{116} = 8,35$	$e_{13} = \frac{(17 \times 35)}{116} = 5,13$
$e_{21} = \frac{(41 \times 24)}{116} = 8,48$	$e_{22} = \frac{(41 \times 57)}{116} = 20,15$	$e_{23} = \frac{(41 \times 35)}{116} = 12,37$
$e_{31} = \frac{(29 \times 24)}{116} = 6,00$	$e_{32} = \frac{(29 \times 57)}{116} = 14,25$	$e_{33} = \frac{(29 \times 35)}{116} = 8,75$
$e_{41} = \frac{(29 \times 24)}{116} = 6,00$	$e_{42} = \frac{(29 \times 57)}{116} = 14,25$	$e_{43} = \frac{(29 \times 35)}{116} = 8,75$

Nilai frekuensi yang diharapkan dalam setiap sel tersebut perlu ditampilkan secara bersama-sama dengan frekuensi yang sesungguhnya pada tabel dibawah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ia mudah dipahami dan perhitungan untuk menentukan nilai khai-kuadrat lebih mudah dilaksanakan

Tabel 3. Frekuensi yang Diharapkan dan Frekuensi Sesungguhnya

Jenis Rezim	% Anggaran Pertahanan Terhadap GDP			Jumlah
	<1	1 - 2	2>	
Full democracy	5(3,52)	11(8,35)	1(5,13)	17
Flawed democracy	7(8,48)	24(20,15)	10(12,37)	41
Hybrid regime	10(6)	10(14,25)	9(8,75)	29
Authoritarian	2(6)	12(14,25)	15(8,75)	29
Jumlah	24	57	35	116

Setelah itu, berdasarkan tampilan dalam tabel di atas, nilai khai-kuadrat dalam setiap sel dihitung. Besarnya nilai khai-kuadrat pada penelitian kasus ini adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{(5 - 3,52)^2}{3,52} + \frac{(11 - 8,35)^2}{8,35} + \frac{(1 - 5,13)^2}{5,13} + \frac{(7 - 8,48)^2}{8,48} + \frac{(24 - 20,15)^2}{20,15} \\ & + \frac{(10 - 12,37)^2}{12,37} + \frac{(10 - 6)^2}{6} + \frac{(10 - 14,25)^2}{14,25} + \frac{(9 - 8,75)^2}{8,75} + \frac{(2 - 6)^2}{6} \\ & + \frac{(12 - 14,25)^2}{14,25} + \frac{(15 - 8,75)^2}{8,75} = \\ & 0,62508452 + 0,838484 + 3,324268 + 0,25918138 + 0,737052 + 0,454313 + 2,66666667 + \\ & 1,267544 + 0,007143 + 2,66666667 + 0,355263 + 4,464286 = 17,66595 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai khai-kuadrat adalah 17,66595. Nilai khai-kuadrat hasil perhitungan itu lebih besar dari pada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 12,592. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP ditolak. Pada konteks ini, jenis rezim suatu negara mempunyai korelasi dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP. Karena ternyata pada kedua variabel terjadi korelasi, seberapa jauh variabel tersebut memiliki korelasi dihitung dengan formulai nilai koefisien Cramer C. nilainya dalam penelitian kasus ini adalah:

$$C_r = \sqrt{\frac{17,66595}{116 + (3 - 1)}} = \sqrt{0,14971147} = 0,38692566 \text{ atau } 38,69\%$$

Efek dari peningkatan tingkat demokrasi akan terkait dengan perdamaian, dengan alasan bahwa ketika tingkat demokrasi meningkat, kemungkinan konflik antar negara menurun. Argumennya mengikuti bahwa negara-negara yang lebih demokratis mengalokasikan lebih sedikit sumber daya mereka yang langka untuk tujuan pertahanan daripada negara-negara yang kurang demokratis. Selain itu penelitian Blum (2020) dengan judul *Democracy's Third Wave and National Defense Spending* menyimpulkan bahwa gelombang ketiga demokrasi menurunkan pengeluaran pertahanan relatif terhadap PDB sekitar 10% di negara-negara yang mengalami demokratisasi. Hasil ini tidak menunjukkan heterogenitas di seluruh wilayah dunia yang dicapai oleh gelombang ketiga di sub-gelombang yang berbeda. Demokrasi menurunkan pengeluaran pertahanan nasional relatif terhadap PDB sekitar 20% di dalam negara, efek jangka panjang kumulatif dari demokratisasi yang dihasilkan dari dinamika pengeluaran pertahanan hampir tiga kali lebih tinggi (Blum, 2020) .

Teori Amartya Sen: Kapabilitas, kebebasan dan demokrasi, pendekatan kapabilitas menarik perbedaan antara sumber daya, kapabilitas dan fungsi. Sumber daya adalah semua barang dan jasa yang tersedia untuk individu (barang yang diperdagangkan

dan tidak diperdagangkan, hak yang diberikan oleh masyarakat seperti hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial, dll.): ini termasuk dalam fakta hak formal. Kemampuan, atau hak nyata, adalah kebebasan aktual orang untuk memilih cara hidup mereka dan menggunakan sumber daya yang tersedia bagi mereka: semuanya tergantung pada masyarakat dan lingkungan tempat mereka tinggal. Fungsi, terakhir, adalah cara individu pada akhirnya bertindak: perilaku aktual mereka pada analisis terakhir bergantung pada keberadaan kemampuan nyata. Meningkatkan pilihan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan mereka, dan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya: kesehatan, gizi, pendidikan, dll. Tentu saja, kemampuan ini hanya dapat digunakan jika keadaan ekonomi (akses ke sumber daya produktif, kredit, pekerjaan, dll), kondisi politik (partisipasi politik yang diizinkan oleh rezim) dan lingkungan sosial memungkinkan. Demokrasi adalah jantung dari sistem ini, dan fungsinya tidak hanya untuk menjamin hak pilih. Ia harus memastikan bahwa kebebasan rakyat didasarkan pada kebebasan politik (partisipasi terbuka dalam debat) dan juga harus memainkan peran instrumental dan konstruktif. Dalam sistem inilah kebebasan pers menjadi sangat penting.

Amartya Sen melihat demokrasi tidak hanya terdiri dari penghormatan terhadap kekuasaan mayoritas tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kebebasan rakyat, akses universal terhadap hak, partisipasi dalam musyawarah publik, dan akses informasi. Penduduk membutuhkan jaminan akses terhadap sumber daya, yang mencakup baik hak yang melekat padanya maupun kondisi aksesnya. Pendekatan kemampuan dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan sosial dalam kaitannya dengan kemampuan manusia daripada utilitas (kebahagiaan, kepuasan keinginan) atau kekuatan sumber daya (pendapatan, barang, aset). Karena multidimensi dan multidisiplin, pendekatan ini telah diadopsi secara universal dan digunakan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan manusia (Sen, 2005).

Guseva et al (2008) *Press freedom and military expenditure*, menyimpulkan negara-negara yang sangat termiliterisasi sering kali otoriter, dengan penguasa yang berusaha mempertahankan rezimnya melalui kekerasan dan intimidasi yang merugikan kondisi kehidupan yang layak bagi warga negara. Korelasi antara kebebasan pers dan pengeluaran militer terbatas tetapi positif. Ini menegaskan, kemudian, bahwa negara-negara di mana perang bukan tujuan utama juga negara-negara yang dapat memiliki pers yang bebas. Meskipun demikian, karena angka-angka yang tersedia tidak selalu mencerminkan situasi yang sebenarnya dan koefisien determinasi (R) dari regresi tidak terlalu tinggi, kesimpulan yang mungkin adalah bahwa kebebasan pers hanya

dapat dikaitkan dengan militerisasi Negara tingkat rendah (walaupun ini bukan kesimpulan yang kuat secara statistik).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa negara-negara demokrasi membelanjakan dana militernya lebih sedikit dibandingkan negara-negara non-demokrasi. Namun beberapa pengecualian terjadi untuk negara semisal Amerika Serikat dan Israel. Akan tetapi pengecualian tersebut kemudian diberikan deskripsi yang sangat lengkap oleh penelitian yang dilakukan Hauenstein, Smith, dan Souva (2021). Dari penelitian tersebut semakin memperkuat korelasi antara tipe rezim dan anggaran pertahanan. Hubungan antara tipe rezim dan pengeluaran militer bergantung pada ancaman eksternal. Di antara negara-negara yang tidak merasakan ancaman eksternal yang signifikan terhadap kepentingan mereka, negara-negara demokrasi mengalokasikan dana yang jauh lebih sedikit militer dibandingkan negara-negara non-demokrasi. Namun, negara-negara demokrasi dengan ancaman eksternal yang signifikan tidak mengalokasikan dana yang lebih sedikit untuk hal tersebut militer dibandingkan non-demokrasi. Alasan mengapa penelitian sebelumnya secara konsisten menemukan bahwa negara-negara demokrasi, rata-rata, mengeluarkan dana lebih sedikit untuk belanja negara militer, meskipun sedang mengendalikan ancaman eksternal, berpendapat bahwa negara-negara demokrasi cenderung tidak mempunyai pengaruh eksternal yang tinggi ancaman.

Literatur cenderung berasumsi bahwa hubungan sebab-akibat dimulai dari tipe rezim hingga pengeluaran militer, namun kita juga bisa memperkirakan bahwa pengeluaran militer akan mempengaruhi tipe rezim: sejarah memberikan banyak contoh negara-negara yang proses demokratisasinya dibalikkan oleh kekuatan militer yang tidak mau melepaskan posisi istimewanya dalam pemerintahan. masyarakat. Keberhasilan demokratisasi antara lain memerlukan reformasi hubungan sipil-militer. Dalam makalah ini, saya memanfaatkan literatur empiris mengenai transisi demokrasi dan mengkaji apakah menurunkan pengeluaran militer di negara yang mengalami demokratisasi akan meningkatkan peluang keberhasilan konsolidasi demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan dengan mendasarkan pada prosedur pengujian hipotesis yang sudah dilakukan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP ditolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada korelasi antara jenis rezim suatu negara dengan besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jenis rezim suatu negara dengan

besarnya anggaran pertahanan menurut persentase terhadap GDP adalah 0,3869. Kriteria rentang nilai korelasi itu masuk kriteria sedang. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa memang terdapat korelasi diantara jenis rezim suatu negara terhadap besarnya anggaran pertahanan. Rekomendasi yang diberikan bahwa dalam menentukan besaran anggaran pertahanan hendaknya disesuaikan dengan praktik yang sudah dijalankan di negara-negara demokrasi dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait semisal ancaman dari luar.

REFERENSI

- Admojo, W.S., Trisiana, A., & Susilo, S.H. (2021). Membangun Kedewasaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Global Citizen*, 10(1), 112-123.
- Badu, M.N. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 9-22.
- Blum, J. (2020). Democracy's Third Wave and National Defense Spending. *Ifo Working Papers*, 339, 1-52.
- Brauner, J. (2012). Military Spending and Democratisation. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 18(3).
- Brogi, E., & Parcu, P.L. (2014). Evolving Regulation for Media Freedom and Pluralism in The European Union. *Utilities Policy*, 31(1), 256-265.
- Collier, P. & Hoeffler, A. (2002a). On the Incidence of Civil War in Africa. *Journal of Conflict Resolution*, 46(1), 13-28.
- Collier, P. & Hoeffler. (2002b). Greed and Grievance in Civil War. Working Paper No. WPS 2002-01, Centre for the Study of African Economies, Retrieved from: http://www.economics.ox.ac.uk/CsAEad-min/workingpapers/pdfs/2002-01_text.pdf.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Moderat*, 7(1), 1-9.
- Diki, M., & Nurmalasari. (2021). Dinamika Demokrasi Elektoral (Studi tentang Sentimen Anti-Partai di era Reformasi). *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 58-65.
- Hakiki, K.M. (2015). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1(1), 1-17.
- Harimurti, Y.W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1), 1-25.
- Hauenstein, M., Smith, M., & Souva, M. (2021). Democracy, External Threat, and Military Spending. *SAGE*, 1-13.
- Imron, Yuliana, S., Dewi, V., & Rindiani, A. (2021). Penguatan Demokrasi dalam Politik Identitas dan Populisme di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 1(1), 239-250.
- Indiyastutik, S. (2016). Demokrasi Radikal Menurut Jacques Ranciere. *Diskursus*, 15(2), 130-166.

- Iqlima, D. (2016). Demokrasi dalam Kajian Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 72-84.
- Koho, I.R. (2021). Oligarki dalam Demokrasi Indonesia. *LENSA*, 4(50), 60-73.
- Kristal, D. (2021). Perbandingan Dekonsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 125-139.
- Lawelai, H., Sadat, A., & Suherman, A. (2022). Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Analisis Sentimen di Twitter. *Praja*, 10(1), 40-48.
- Mubarok, H. (2018). Demokrasi, Politik Identitas, dan Koheisi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 2(2), 365-400.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379-395.
- Nabus, E.K., & Siahaan, C. (2021). Demokrasi sebagai Bentuk Komunikasi Politik Kaum Remaja. *Humantech: Jurnal Ilmiah Humantech*, 1(1), 19-24.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Rangkuti, A. (2018). Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 49-59.
- Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia. *IPTEK-KOM*, 21(2), 123-138.
- Roring, F.P. (2020). Kolonialisme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru. *Jurnal Communitarian*, 2(2), 331-342.
- Sanit, A. (2015). Gagasan Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1), 155-175.
- Sofyan, A. (2013). Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat ini). *Politika*, 4(2), 1-9.
- Sukma, F., & Saparuli. (2021). Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 1(3), 140-154.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 881-894.
- Wahyudi, A., Tegar, A., Arifandi., Pratama, B., Raihanda, R., Musdamil, Wanda, R., Maulana, R., Satria, Tirta, Yogi, Zikri, & Zulkarnain. (2022). Pendidikan Demokrasi. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 230-235.
- Yildirim, J., & Sezgin, S. (2005). Democracy and Military Expenditure: A Cross-Country Evidence. *Transition Studies Review*, 12(1), 93-100.
- Yunitasari, Y., Sugiyanto, & Swastika, K. (2017). Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001. *Jurnal Historica*, 1(1), 79-97.